

antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20

Pak Harto yang isinya meminta agar beliau turun atau lengser dari jabatan presiden. Pertemuan itu mengutus Kyai Muchid Muzadi dari Jember dan Gus Yusuf Muhammad menghadap Pak Harto untuk menyampaikan surat itu. Mereka berangkat ke Jakarta, meminta waktu tetapi belum dapat jadwal. Sehingga sebelum surat itu diterima, Pak Harto sudah mengundurkan diri terlebih dahulu tanggal 23 Mei 1998.

Pada tanggal 30 Mei 1998, diadakan istighosah akbar di Jawa Timur. Lalu semua kyai berkumpul di kantor PWNU Jatim. Para kyai itu mendesak KH Cholil Bisri supaya menggagas dan membidani pendirian partai bagi wadah aspirasi politik NU. Ia menolaknya karena tidak mau terlalu berkecimpung jauh dalam dunia politik dan merasa lebih baik di dunia pesantren saja. Akan tetapi para kyai terus mendorongnya karena dinilai lebih berpengalaman dalam hal politik. Pada saat itu Gus Dur belum ikut dalam pertemuan ini.

3. Pemilihan umum

Partai ini pertama mengikuti pemilu pada tahun 1999 dan pada tahun 2004 mengikutinya lagi. Partai yang berbasis kaum NU ini sempat mengajukan Gus Dur sebagai presiden yang menjabat dari tahun 1999 sampai pertengahan 2001. Pada tahun 2004, partai ini memperoleh hasil suara 10,57% (11.989.564) dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR. Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 27 kursi (4,82%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota

Adapun Mabda' Siyasi (pondasi) politik PKB berjumlah 9 seperti jumlah bintang yang terdapat di lambang partai. Isi pokok-pokok mabda' Siyasi PKB yaitu ;

- a) Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI: mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, adil, makmur , sejahtera, bermartabat dan sederajat dengan bangsa lain di dunia serta pemerintahan NKRI
- b) Cita-cita PKB tentang Bangsa, Bangsa yang dicita-citakan PKB adalah bangsa yang :
 - 1) Terjamin HAM
 - 2) Dapat dipercaya setia dan tepat janji
 - 3) Mampu memecahkan masalah sosial yang dihadapi
 - 4) Bersikap dan bertindak secara adil dalam segala hal
 - 5) Suka tolong menolong dalam kebijakan
 - 6) Konsisten menjalankan yang telah disepakati bersama
 - 7) Menegakan prinsip musyawarah
 - 8) Meletakkan persamaan derajat di depan hukum
- c) Misi utama dan Pilihan pendekatan : Mewujudkan tatanan masyarakat yang beradab sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara. Pola pendekatan yang dilakukan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ciri-ciri masyarakat yang beradap yaitu

terpelihar jiwa raga, terpenuhi kemerdekaan dan terpenuhinya hak-hak dasar manusia.

- d) Kekuasaan sebagai alat Perjuangan : Fakta menunjukkan, selama masa orde baru , kaum NU seakan anak yang tidak diinginkan. Guru ngaji diawasi, mengisi pengajian harus lapor polisi dan masah banyak lainnya. Akan tetapi, sewaktu Gusdur menjadi Presiden , semua orang tiba-tiba mengaku NU, mengelu-elukan NU dan bangkitlah martabat warga NU.
- e) Kekuasaan sebagai Amanah Allah : Kekuasaan memang melenakan , seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan karena berkuasa yang begitu lama. Dalam Al-Qur'an Allah Berfirman “sungguh manusia akan menjadi semena-mena manakala merasa dirinya berkuasa”. Firman lainnya Allah mengatakan “katakan(wahai Muhammad) Allah-lah Maha raja-raja, yang memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan dari orang yang dikehendaki”. Atas dasar itulah PKB memandang bahwa kekuasaan adalah amanat Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapn-NYA.
- f) Kekuasaan untuk Rakyat: Sesuai slogan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan seharusnya kekuasaan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan

kemakmuran rakyat. Agar kekuasaan bisa dikontrol, maka harus dibatasi dan dijalankan sesuai institusional.

- g) Pancasila sebagai Asas dan Ukhuwah sebagai Jiwa Perjuangan: Mengapa Pancasila bukan Islam yang menjadi asas?? Karena kita hidup di NKRI dengan beragam suku, ras, agama, budaya. Hal ini yang dijadikan dasar oleh para Founding Fathers untuk merumuskan Pancasila sebagai Dasar Negara RI. Dalam sejarah ada pemaksaan Islam menjadi dasar negara melalui 'Piagam Jakarta' dalam sile pertama (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) hal tersebut justru mengancam perpecahan dimana-mana. Dari sisi agama akan ada reaksi keras dari non-muslim. Atas dasar ini dalam tradisi NU ada 3 konsep untuk menjalin hubungan antar warga ; mengembangkan tali persaudaraan antar sesama dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah) dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah).
- h) Partai Politik bercorak Humanisme Religius: Ada 3 komunikasi yang melingkupi manusia dalam kehidupannya ; hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam. Politik bagian dari hubungan manusia dengan sesama manusia (insaniyah). Dengan prinsip Insaniyah, PKB menegaskan bahwa dalam setiap mengambil

dari kubu DPC PKB Ahmad Nadir dan Ali Muchid dengan adanya kasasi dari Moh. Syafi' dan Ainnur Rafiq ke Mahkamah Agung (MA) dengan pembahasan pergantian ketua dan sekretari DPC PKB Kabupaten Gresik, sedangkan kubu Ahmad Nadir dan Ali Muchtar menganggap bahwasanya pergantian tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai. Dimana di dalam AD maupun ART menurut kubu Ahmad Nadir dan Ali Muchtar menegaskan setiap pergantian harus ada pengesahan dari Ketua Dewan Syuro DPP (Abdurahman Wahid alias Gus Dur) pada saat itu dimana Gus Dur masih hidup dan menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB.

b. Konflik DPC PKB Kabupaten Gresik Tahun 2009-2010

Pada tahun 2009 konflik memanas juga terjadi antar anggota pengurus DPC PKB Kabupaten Gresik, dimana pada saat Ahmad Nadir resmi dicopot jabatannya karena kasus korupsi KUT, Zulfan Hasyim selaku Wakil ketua Dewan Syuro pada saat itu terpilih menjabat sebagai Ketua DPRD Gresik untuk sementara menggantikan Ahmad Nadir, dan kemudian Zulfan Hasyim kembali dipilih oleh DPP PKB menjadi Ketua DPRD Gresik periode 2009-2014 melalui surat rekomendasi nomor 4594/DPR-03/V/A.1/IX/2009 tertanggal 10 September 2009. Terpilihnya wakil ketua Dewan Syuro DPC PKB Gresik ini menjawab keraguan berbagai elit politik di Gresik yang sebelumnya lebih menjagokan Hamim

Terpilihnya Zulfan Hasyim di luar prediksi. Sebab, diantara nama-nama yang dikirim ke DPP; Moh Syafik AM dan Hamim Mubhan merupakan terkuat. Selain pengalaman, keduanya juga menempati posisi yang strategis di DPC PKB. Apalagi, Hamim Mubhan sempat menjadi ketua menggantikan Ahmad Nadir yang tersandung perkara korupsi KUT. Tak salah bila timbul berbagai analisa terpilihnya Zulfan diprediksi mengganggu kekompakan internal DPC PKB.

Namun hal itu dibantah Ainur Rofiq. Mantan anggota DPRD periode 1999-2004 tersebut menyebutkan, bila semuanya sudah diantisipasi oleh DPC PKB Gresik. Apalagi, dia menilai semua keputusan pasti ada yang kecewa dan ada yang senang menyikapi keputusan DPP PKB tersebut.

c. Konflik DPC PKB Kabupaten Gresik Tahun 2010-2014

Sejak munculnya konflik pada tahun-tahun sebelumnya, yakni dimana ketika Zulfan Hakim menjabat sebagai ketua DPRD Gresik dan Moh. Syafi' menjabat sebagai ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Gresik, konflik di internal DPC PKB Kabupaten Gresik masih belum usai, bahkan konflik berlarut-larut, konflik berkembang menjadi konflik kelomok yakni antara kepengurusan Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro, antara kepemimpinan Moh. Syafi' dan KH. Robbach Ma'sum, dimana dua kepengurusan tersebut saling menyalahkan satu sama lain atas kepemimpinan masing-masing.

Dua kelompok kepengurusan saling serang satu sama lain, saling melaporkan kepengurusan tingkat yang lebih atas, seperti halnya DPW dan DPP PKB.

Selain Ketua Dewan Tanfidz Moh. Syafik AM dengan Ketua Dewan Syuro KH Robbach Ma'sum yang tidak sevisi, juga ada 12 dari 18 DPAC yang mosi tidak percaya kepada ketua. Bahkan, beberapa pengurus DPC PKB juga membelot dan tidak sepakat kebijakan Ketua DPC Moh. Syafik, antara lain Irsyadul Ibad (sekretaris) dan Munawar (bendahara). Akibatnya, musyawarah kerja cabang (muskercab) DPC PKB digelar apa adanya.

Atas dasar itulah, sebagai salah satu pendiri PKB di Kabupaten Gresik, khususnya di Pulau Bawean, Zulfan Hasyim menyesalkan sikap DPP PKB yang tidak berani mengambil keputusan tegas terkait konflik yang terjadi di tubuh DPC PKB Gresik.

Zulfan juga menyesalkan adanya statemen liar ancaman dengan melakukan pergantian antar waktu (PAW), ditujukan kepada anggota dewan yang juga Ketua DPAC PKB karena tak hadir serta menganggap musyawarah kerja cabang (muskercab) yang dilaksanakan oleh DPC PKB Gresik, tidak sah.

Muhajir, selaku pendukung kubu Moh. Syafik menolak berkomentar. Bahkan, dirinya juga menolak menjawab saat diminta konfirmasi kemungkinan tersebut.

